

ABSTRAK

FAUZAN ALSADILLA HERMAWAN (2210622060). *HAK JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK): STUDI KASUS PHK PT. FI.* Dibimbing oleh Muthia Sakti sebagai Pembimbing Utama dan Iwan Erar Joesoef sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan Hak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT. FI dan mengevaluasi pengaturan hak JKN pasca PHK yang memberikan keadilan bagi pekerja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mencakup seleksi dan klasifikasi bahan hukum serta analisis normatif terhadap peraturan yang relevan. Berdasarkan temuan lapangan, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan administratif dalam pelaporan status PHK yang menyebabkan penundaan pemenuhan hak jaminan kesehatan bagi pekerja yang ter-PHK. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun pengaturan JKN pasca PHK sudah diatur dalam undang-undang, implementasi yang tidak tepat dapat menghambat pemberian hak secara adil. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan prosedur pelaporan, peningkatan pengawasan oleh BPJS Kesehatan, dan edukasi lebih lanjut bagi perusahaan untuk menghindari kesalahan administratif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang pentingnya keadilan sosial dalam pengaturan jaminan kesehatan bagi pekerja yang di-PHK.

Kata kunci: Hak, Jaminan Kesehatan Nasional, pekerja, PHK, keadilan

Abstract

FAUZAN ALSADILLA HERMAWAN (2210622060). *National Health Insurance (JKN) Rights After Termination of Employment (PHK): Case Study of PT. FI. Supervised by MUTHIA SAKTI as Principal Supervisor and IWAN ERAR JOESOEUF as Co-Supervisor*

This study aims to analyze the fulfillment of National Health Insurance Rights (JKN) for workers who experience Termination of Employment (PHK) at PT. FI and evaluate the regulation of JKN rights after layoffs that provide justice for workers. The method used is normative legal research with a qualitative approach, which includes the selection and classification of legal materials as well as normative analysis of relevant regulations. Based on field findings, this study shows that there are administrative errors in reporting the status of layoffs that cause delays in fulfilling health insurance rights for laid-off workers. In addition, this study also found that even though the post-layoff JKN regulation has been regulated in the law, improper implementation can hinder the granting of rights fairly. This study recommends simplifying reporting procedures, increasing supervision by BPJS Kesehatan, and further education for companies to avoid administrative errors. Thus, this study contributes to the understanding of the importance of social justice in regulating health insurance for laid-off workers.

Keywords: *Rights, National Health Insurance, workers, termination, justice*